

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT, maka peneliti menarik kesimpulan yaitu:

1. Dinas PUPR telah melaksanakan Sistem Pengendalian Internal atas Penatausahaan Belanja Daerah untuk aktivitas di Pemda.
2. Diketahui masih ada 2 unsur Sistem Pengendalian Internal yang belum dilaksanakan dengan maksimal yaitu Penilaian Resiko dan Kegiatan Pengendalian yang menyebabkan terjadinya kesalahan pencatatan dengan jumlah yang cukup besar.
3. Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal lainnya sudah dijalankan dengan baik dan sudah sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2008.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang nantinya dapat memperbaiki serta menyempurnakan pelaksanaan pengendalian internal. Saran-saran yang diberikan yaitu :

1. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT
 - a. Lebih meningkatkan kinerja dari setiap pegawai negeri sipil, karena pegawai negeri sipil memiliki peranan yang lebih penting dalam menjadikan pemerintahan yang lebih baik lagi.

- b. Sistem Akuntansi Pengeluaran Kas harus diatur dan dirancang dengan lebih baik lagi dan lebih teliti agar jika terjadi permasalahan seperti kesalahan dalam pencatatan dapat lebih berkurang atau lebih mudah mengatasinya.
- c. Lebih dapat meningkatkan dan mempertahankan sistem pengeluaran kas dan diharapkan untuk tetap mengikuti peraturan yang berlaku jika terjadi perubahan peraturan.

2. Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian selanjutnya diharapkan mempeluas ruang lingkup penelitian pada kota ataupun kabupaten. Sehingga dapat dijadikan bahan perbandingan antara penelitian satu dengan yang lain.

- a. Penelitian berikutnya diharapkan menambah responden dan memilih responden yang berbeda, sehingga responden pada penelitian ini agar beragam banyak responden atau sasaran responden lebih luas dan berbeda sehingga bisa menjadikan acuan untuk melakukan penelitian selanjutnya.
- b. Sistem pengumpulan data kedepannya harus mendampingi responden supaya tidak adanya kesalah pahaman atau ketidak jelasan dalam pertanyaan yang diajukan.
- c. Penelitian berikutnya diharapkan menggunakan variabel lain untuk memperluas atau mengembangkan variabel yang diteliti pada semua SKPD.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2010 . Sitem Akuntansi Keuangan Daerah.
- Abdul Halim. 2012. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat
- Abdul Halim dan Kusufi 2012. Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah.
Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat.
- Amiseno, A. (2014). Analisis Sistem Pengendalian Intern Atas Penatausahaan Belanja Daerah Pada Provinsi X. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1).
- Cindy Bawiling. (2015) .Evaluasi Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pengeluaran Kas pada Kantor Pengendalian Agama Tondano.
- Erlina. (2015) . Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua.
- Mulyani, P., & Suryawati, R. F. (2011). Analisis peran dan fungsi sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP/PP NO. 60 TAHUN 2008) dalam meminimalisasi tingkat salah saji pencatatan akuntansi keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, 7(2), 102-116.
- Nurwani, N. (2018). Analisis Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial Di Dinas Sosial Kota Parepare. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 1(3), 31-38.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Belanja Modal.
- Undang-Undang No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi.